

**KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
DI DESA BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERFORMANCE OF IMPLEMENTATION POVERTY ALLEVIATION PROGRAMME
THROUGH SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE
IN BEJIHARJO VILLAGE KARANGMOJO SUBDISTRICT
GUNUNGKIDUL REGENCY**

Evi Nilawati
Universitas Gunung Kidul Yogyakarta
Jl. Agus Salim 170 Wonosari Gunungkidul Yogyakarta
Telp. (0274) 391342, Fax. (0274) 391342
Email: alfitra_n@yahoo.co.id

Abstract

Research about performance of implementation Poverty Alleviation Programme through Special Financial Assistance (BKK), aims to know the performance of the implementation the Special Financial Assistance (BKK) on poverty reduction and determine the factors that affect the performance of implementation that programme. This research used the descriptive qualitative approach on the implementation of BKK in order to eradicate poverty. Informen were taken by purposive sampling and data were obtained through secondary data, observation, and as well as indepth interviews. This research was conducted in the Bejiharjo Village Karangmojo Subdistrict Gunungkidul Regency. The results showed that the performance of the implementation poverty alleviation programme through Special Financial Assistance (BKK) has generally been oriented approach for compliance in implementation. It means that the implementation is in conformity with the mechanisms and procedures as set forth in the Regulation of the Governor and the Decree. The programme has also been able to move socioeconomic poverty household members (RTS) towards improving the quality of life and well-being. Based on the research found that performance of implementation are influenced by environmental condition (phisical, social and economic), inter – organization relationship, resources for programme implementation, and characteristics of the implementing agency. Although until now Programme BKK can not be said to be able to raise the standard of living and well-being because of limited funds on each RTS and implementation of the programme has been running for 2 (two) years, but at least the programme has been able to mobilize socioeconomic member RTS toward improvement of living standard and prosperity.

Keywords : performance of public policy implementation, environmental condition (physical, social, and economic), inter – organization relationship, the resources for programme implementation, and characteristics of the implementing agency.

Abstrak

Penelitian kinerja implementasi Program Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasi program tersebut dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan diambil dengan cara *purposive sampling* dan data didapatkan melalui data sekunder, observasi, maupun wawancara mendalam (*indepth interview*). Penelitian ini dilakukan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi Program Pengentasan Kemiskinan melalui BKK telah berorientasi pada pendekatan kepatuhan (*compliance*), artinya dalam implementasinya sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati tentang Pengentasan Kemiskinan melalui BKK. Program tersebut telah mampu menggerakkan dinamika sosial ekonomi masyarakat anggota RTS menuju ke arah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi program pengentasan kemiskinan melalui BKK dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan (fisik, sosial, dan ekonomi), hubungan antar organisasi, sumber daya untuk implementasi program, dan karakteristik pelaksana. Meskipun sampai saat ini Program BKK belum dapat dikatakan mampu mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan karena keterbatasan dana pada masing-masing RTS dan pelaksanaan program yang baru berjalan 2 (dua) tahun, namun setidaknya program tersebut telah mampu menggerakkan sosial ekonomi masyarakat anggota RTS menuju ke arah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.

Kata kunci : Kinerja implementasi kebijakan publik, kondisi lingkungan (fisik, sosial, dan ekonomi), hubungan antar organisasi pelaksana, sumberdaya untuk implementasi program, dan karakteristik pelaksana.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kebutuhan akan hidup yang sehat, dan kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak-anak. Penduduk miskin “tidak berdaya” dalam memenuhi kebutuhannya, tidak saja karena mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan, tetapi juga karena struktur sosial, ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik tidak membuka peluang orang miskin keluar dari lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal.

Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan penguatan dan kebijakan khusus untuk menurunkan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan melalui program khusus pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan upaya melalui strategi dan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

Program pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) merupakan bentuk kebijakan publik yang diimplementasikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. (Chandler dan

Plano dalam Yeremias T. Keban)¹. Menurut Peterson kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”.²

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di DIY, telah dilakukan penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Bantuan Keuangan Khusus yang didasarkan pada hasil kajian kerjasama antara Pemerintah DIY dengan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 205/KEP/2013 Tentang Penetapan RTS dan Jumlah BKK kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Data dasar Program BKK adalah data kemiskinan mikro yaitu Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, antara lain menghasilkan basis data terpadu Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Keluarga Sasaran (KS) untuk program-program bantuan sosial :

1. Menurut nama dan alamat kepala RTS/KS;
2. Mencakup 40 % penduduk kelas menengah bawah (miskin dan rentan miskin) secara nasional, dengan persentase berbeda untuk setiap provinsi/kabupaten/kota sesuai intensitas kemiskinan);
3. Memuat keterangan sosial ekonomi penduduk sesuai persyaratan bantuan dan program perlindungan sosial, khususnya program penanggulangan kemiskinan klaster satu.

Program Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan BKK merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi produktif. Berdasarkan

¹Yeremias T. Keban, 2014, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Yogyakarta, Gava Media, halaman 60.

²Ibid., halaman 61.

evaluasi tahun 2013, penyaluran BKK di Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga bulan Agustus 2013 bisa disalurkan semua, atau sesuai target sehingga bisa dievaluasi melalui SUSENAS bulan September 2013. Pelaksanaan penyaluran BKK di Kabupaten Gunungkidul merupakan yang tercepat di DIY. Pelaksanaan Tahun 2014 merupakan tahun kedua. Penerima BKK tahun 2014 berbeda dengan penerima tahun 2013. Tahun 2013 terdapat 16.615 RTM, sedangkan tahun 2014 sejumlah 8.335 RTM. RTM tahun 2014 mengalami penurunan dengan asumsi bahwa jumlah RTM yang berada pada strata dibawah garis kemiskinan sudah semakin berkurang. Adapun implementasi program pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Keuangan Khusus tahun 2014 terdiri dari 655 kelompok yang tersebar di delapan belas (18) kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.

Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut tahapan penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan "jembatan" antara dunia konsep dengan dunia realita seperti Grindle yang menyebut bahwa implementasi "*establish link that allows goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity*".³

Studi tentang kinerja implementasi kebijakan terhadap Program BKK perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan

publik, baik itu usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu. Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana kinerja implementasi program pengentasan kemiskinan melalui BKK, dengan lokus di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja implementasinya.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kinerja implementasi program pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja implementasi program pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul ?

C. TINJAUAN TEORI

Implementasi kebijakan publik merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Meskipun implementasi kebijakan itu penting, akan tetapi baru beberapa dasawarsa terakhir ini saja para ilmuwan sosial menaruh perhatian terhadap masalah implementasi dalam proses kebijakan. Sebagai akibat kurang adanya perhatian pada implementasi kebijakan publik adalah adanya semacam *missing link* atau "mata rantai yang hilang" antara tahap perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa kebanyakan pemerintah di dunia ini baru mampu

³ Erwan A. Purwanto. dan Dyah R.S., 2012, Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta, halaman 65.

untuk mensahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan yang diinginkan.⁴

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik (Chandler dan Plano).⁵ Orang sering tidak melihat arti penting dari implementasi kebijakan. Implementasi, menurut mereka, hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan sehingga kurang berpengaruh. Padahal, dalam kenyataan dapat kita lihat sendiri bahwa betapapun hebatnya suatu rencana program atau kegiatan tetapi apabila itu tidak direalisasikan dengan baik dan benar maka program atau kegiatan itu menjadi sia-sia.⁶

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijaksanaan diwujudkan sebagai "outcome" (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah (Solichin A. Wahab)⁷. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang

diarahkan pada realisasi program (Gordon, 1986). Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi adalah tahapan merealisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program.⁸

Istilah "kinerja" merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan cendekiawan sebagai "penampilan", "unjuk kerja", "prestasi". Dalam kamus *illustrated Oxford Dictionary*, istilah ini menunjukkan "*the execution or fulfilment of a duty*" (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas), atau *a person's achievement under test condition etc.* (pencapaian hasil dari seseorang ketika diuji dan sebagainya).⁹ Kinerja kebijakan adalah derajat dimana hasil kebijakan tertentu memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai.¹⁰ Untuk mengukur kinerja program

⁴Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2008, Analisis Kebijakan Publik Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, LAN, Jakarta, halaman 32.

⁵Inu Kencana Syafie, 2010, Ilmu Administrasi Publik, PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman 105.

⁶Yeremias T. Keban, op. cit., halaman 77.

⁷Solichin A. Wahab, 1989, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Malang, Rineka Cipta, halaman 123.

⁸Yeremias T. Keban, loc. cit.

⁹Ibid, halaman 209.

¹⁰William N. Dunn, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik,

telah dikembangkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yang menilai perilaku atau yang dikenal dengan pendekatan perilaku, dan pendekatan yang menilai hasil dan manfaat yang diberikan atau disebut pendekatan hasil. Keduanya sama-sama penting dalam rangka pengembangan program jangka panjang.¹¹

Menurut INTERPLAN *performance is the primary criterion for judging organization. The terms performance refers to the ongoing operations, activities, programmes or mission of an organization.*¹² Artinya *performance* adalah kriteria utama untuk menilai organisasi. Istilah *performance* menunjuk pada operasi, kegiatan, program dari organisasi. Istilah *performance* menunjuk pada operasi, kegiatan, program dari organisasi. Disini *performance* sebagai kriteria utama dalam menilai program, dan menunjuk pada operasi maupun kegiatan dari program tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ukuran *performance* adalah:

1. Volume pelayanan;
Volume pelayanan meliputi : jumlah butir kegiatan dalam program yang terlaksana, jumlah konsumen yang terlayani, frekuensi kegiatan yang dilakukan, jumlah jenis pelayanan, dan jumlah pelaksana yang terlibat.
2. Kualitas pelayanan;
Kualitas pelayanan meliputi : derajat kesesuaian perubahan yang terjadi dengan harapan,

kepuasan konsumen terhadap pelayanan.

3. Kemampuan memperoleh sumber daya bagi pelaksanaan program;
Sumber daya meliputi : kemudahan menghimpun dana, kemudahan menghimpun tenaga pelaksana, kemudahan menghimpun peralatan, dan kemudahan menghimpun informasi.¹³

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin didasarkan pada 3 (tiga) aspek,¹⁴ yaitu:

1. Tingkat kepatuhan (*compliance*) birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah;
3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang terarah.

Kinerja implementasi program pengentasan kemiskinan melalui bantuan keuangan khusus yang menjadi fokus penelitian ini berhubungan dengan aspek kepatuhan dan pencapaian tujuan program. Program pengentasan kemiskinan melalui bantuan keuangan khusus dijabarkan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomis produktif bagi rumah tangga sasaran yang meliputi usaha pertanian, peternakan, usaha *home industry*, dan usaha jasa produktif lainnya seperti perdagangan. Pemberdayaan ekonomis produktif sangat penting dilakukan mengingat rata-rata warga miskin berpenghasilan rendah sehingga diperlukan upaya peningkatan

Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, halaman 133.

¹¹Yeremias T. Keban, op. cit., halaman 221.

¹²Samodra Wibawa, 1992, Beberapa Konsep Untuk Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, halaman 64.

¹³Ibid., halaman 65.

¹⁴Herabudin, 2016, Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi, Pustaka Setia, Bandung, halaman 142-143.

pendapatan secara khusus melalui kegiatan usaha yang dapat meningkatkan kehidupan dan penghidupan mereka. Kegiatan ekonomis produktif yang bermanfaat bagi warga miskin disesuaikan dengan potensi lokal, mampu secara teknis dilakukan oleh warga miskin dengan didampingi tenaga pendamping, dan memberikan manfaat langsung bagi warga miskin¹⁵. Implementasi program BKK dengan penekanan pada usaha ekonomis produktif merupakan bentuk solusi atas permasalahan kemiskinan yang berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat sementara tingkat pengeluaran dan kebutuhan hidup warga miskin selalu meningkat.

Kinerja kebijakan disamping mencakup pencapaian tujuan, juga berkaitan peningkatan kemampuan pemerintah di unit-unit lokal guna merencanakan dan memobilisasi sumber daya, peningkatan produktivitas dan *income*, peningkatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan akses fasilitas pemerintah. Penelitian ini menggunakan empat variabel penelitian yang mempengaruhi kinerja implementasi program penanggulangan kemiskinan dari Rondinelli dan Cheema,¹⁶ yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan (*environment condition*).
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationships*).
3. Sumber daya untuk pelaksanaan program (*resource for programme implementation*).

¹⁵ Konsultan Manajemen Wilayah Satuan Wilayah Kerja XIV Jawa Tengah, Modul *Coaching* Fasilitator Mengenai KSM, Semarang.

¹⁶Erwan A. Purwanto dan Dyah R.S., op. cit, halaman 90.

4. Karakteristik pelaksana (*characteristic of implementing agencies.*)

Variabel pertama yaitu kondisi lingkungan. Kebijakan dilaksanakan dalam kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kompleks dan spesifik. Oleh karena itu pemahaman terhadap kondisi lingkungan sangat penting bagi perencana dan pembuat kebijakan maupun bagi pelaksana. Bagi perencana dan pembuat kebijakan, pemahaman kondisi lingkungan dimaksudkan agar kebijakan yang dibuat menjamin ketepatan dan kelangsungan implementasinya. Bagi pelaksana, pemahaman terhadap kondisi lingkungan merupakan dasar dalam membuat pedoman dan strategi pelaksanaannya. Kondisi lingkungan antara lain meliputi: struktur politik, struktur kekuasaan lokal, faktor sosial ekonomi, dan budaya, kondisi kelompok-kelompok penerima program dan adanya infrastruktur yang bersifat fisik.

Variabel kedua yaitu hubungan antar organisasi. Kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi pula oleh hubungan antar organisasi yaitu interaksi dan koordinasi sejumlah besar struktur organisasi pemerintah yang berjenjang dalam hubungannya dengan kegiatan pelaksana tingkat lokal regional dan nasional, serta dalam kerjasama dengan organisasi non pemerintah dan kelompok masyarakat yang menerima program. Efektivitas hubungan antar organisasi tergantung pada beberapa hal antara lain:

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan.
2. Alokasi peran dan tugas yang tepat diberikan pada pelaksana berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang ada.
3. Perencanaan, anggaran, dan prosedur pelaksanaan yang jelas

dan pasti, sehingga meminimal konflik yang dapat membuat program dan kebijakan sulit dikoordinasi.

4. Keakuratan, konsistensi, dan kualitas komunikasi antar organisasi, sehingga organisasi-organisasi yang tercakup dalam proses implementasi memahami peran dan tugasnya untuk saling melengkapi satu dengan yang lain.
5. Efektivitas hubungan antar unit-unit administrasi yang terdesentralisasi dan diikuti oleh koordinasi kegiatan.

Variabel ketiga sumber daya. Sumberdaya untuk implementasi kebijakan dan program mencakup dana yang memadai dan kontrol terhadapnya, dukungan secara administratif dan teknik, serta adanya alokasi anggaran yang mencukupi untuk membentuk fungsi-fungsi desentralisasi. Penerimaan sumber daya tersebut oleh pelaksana secara berkesinambungan akan sangat

membantu kelangsungan dan keberhasilan implementasi kebijakan.

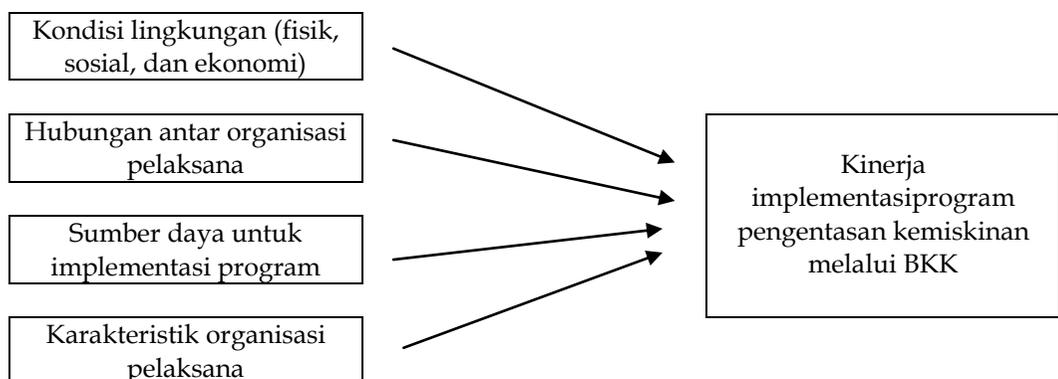
Variabel keempat karakteristik organisasi pelaksana (*characteristic of implementing agencies*) yaitu diutamakan kemampuan pada para pelaksana di bidang kemampuan teknik, managerial, dan politik, kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengintegrasikan setiap keputusan, baik yang berasal dari sub-sub unit organisasi, maupun dukungan dari lembaga politik nasional dan pejabat pemerintah pusat lainnya.

Berkaitan dengan konsep tersebut, akan digunakan sebagai kerangka berfikir dalam analisis implementasi kebijakan dan program Pengentasan Kemiskinan melalui BKK di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Kinerja implementasi merupakan sebuah proses pencapaian tujuan kebijakan yang dipengaruhi oleh empat variabel. Dengan kata lain, keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan dan program dapat dilihat dari kinerja implementasinya.

Dalam penelitian ini bisa digambarkan kerangka berfikir, sebagai berikut :

Gambar 1

Kerangka Fikir



Sumber: Penulis, 2016

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹⁷

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015. Pertimbangan memilih lokasi di Desa Bejiharjo yaitu berkenaan dengan Jumlah RTS nya masih banyak dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Karangmojo.

2. Informan

Informan penelitian ini meliputi unsur-unsur yaitu:

- a. BAPPEDA selaku pengelola Program BKK.
- b. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Gunungkidul.
- c. Penyuluh di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP).
- d. Pemerintah Desa dan para Dukuh di Desa Bejiharjo.
- e. Pengurus dan anggota Pokmas Sasaran Program.

Pemilihan informan secara purposif yaitu dipilih orang-orang dari unsur tersebut sebagai orang kunci yang terlibat dalam implementasi kegiatan pengentasan kemiskinan melalui

program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode yaitu:

- a. Dokumentasi yaitu menggunakan sumber data yang sudah ada, berupa data Rumah Tangga Sasaran Calon penerima dan data Rumah Tangga Sasaran penerima dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo serta catatan-catatan lain yang berkaitan dengan program tersebut.
- b. Metode observasi, yaitu peneliti melaksanakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dan menarik kesimpulan atas obyek yang diteliti. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan atau penginderaan. Peneliti mengamati kembali kinerja implementasi pengentasan kemiskinan melalui program BKK dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Bejiharjo. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif yaitu meletakkan manusia sebagai alat atau instrumen penelitian.
- c. Metode wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu peneliti melaksanakan wawancara yang detil dan mendalam dengan responden yang telah ditentukan, yang meliputi pihak-pihak yang terkait

¹⁷Jamaluddin Ahmad, 2015, Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi, Gava Media, Yogyakarta, halaman 52.

dengan implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Sebagaimana diketahui bahwa dengan metode kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan kedalaman mengenai fakta yang ada. Dengan *indept interview* menggunakan pedoman wawancara, agar peneliti bisa mendapatkan yang mencerminkan kinerja implementasi program BKK di Desa Bejiharjo lebih lengkap dan seakurat mungkin untuk melengkapi hasil observasi sesuai kebutuhan data yang diperlukan. Peneliti juga terbuka untuk mengembangkan tema-tema wawancara baru di lokasi wawancara untuk memperdalam informasi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data ditempuh dengan kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹⁸ Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber informan, dengan menggunakan teknik pengolahan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.¹⁹ Pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau membandingkan data dari berbagai informan yang sudah ditentukan, dan data wawancara dengan data observasi di Desa Bejiharjo. Untuk melengkapi analisis data peneliti berupaya melakukan wawancara kembali dan melihat kondisi lapangan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang menekankan pada penyajian data secara kualitatif yang mencoba memberikan kesimpulan-kesimpulan kualitatif dari keseluruhan data kinerja implementasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK), kondisi lingkungan (fisik, sosial, dan ekonomi), hubungan antar organisasi, sumber daya untuk implementasi program, dan karakteristik pelaksana. Deskripsi kumpulan informasi tentang kinerja implementasi program BKK di Desa Bejiharjo yang sudah terkumpul selanjutnya digunakan dasar dalam melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data hasil penelitian yang disajikan berupa kata-kata.

E. HASIL PENELITIAN

1. Profil Desa Bejiharjo

Desa Bejiharjo merupakan desa di Kecamatan Karangmojo, dengan luas wilayah 2200,94 ha sehingga menjadikan desa ini sebagai desa terbesar di Kecamatan Karangmojo. Dua puluh lima persen wilayahnya merupakan hutan negara. Dengan dua puluh (20) dusun yang berada di dalamnya dan memiliki potensi wisata masing-masing. Di desa tersebut terdapat dua belas (12) goa, sungai, telaga, areal persawahan, perikanan, perkebunan kayu putih, dan beberapa situs purbakala yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Namun hingga saat ini hanya terdapat lima destinasi wisata yang paling diminati dan dikembangkan oleh masyarakat yaitu Goa Pindul, Sungai Oya, Goa Glatik, Goa Sriti dan Telaga Mriwis Putih.

Adapun nama-nama dusun di Desa Bejiharjo adalah : Sokoliman I, Sokoliman II, Seropan, Gunungbang, Gelaran I, Gelaran II, Karangmojo, Karanglor, Bulu, Banyubening I, Banyubening II, Kulwo, Ngringin, Gunungsari, Grogol I, Grogol II, Grogol III, Grogol IV, Grogol V, dan Grogol VI.

¹⁸Ibid, halaman 174.

¹⁹Ibid, halaman 179.

Desa Bejiharjo merupakan desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Karangmojo dengan jumlah penduduk lebih dari 16.000 jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan petani, sehingga banyak ditemukan lahan berupa sawah di desa ini. Sedangkan sebagian lainnya merupakan pengrajin, PNS, serta wiraswasta. Seperti halnya sebuah desa, suasana kekeluargaan dan gotong royong masih sangat kental terasa di desa ini dan sudah menjadi bagian dari budaya setempat. Setiap dusun di Desa Bejiharjo ini rutin mengadakan upacara rasulan. Upacara rasulan merupakan upacara yang diadakan sebagai wujud syukur atas apa yang masyarakat dapatkan dari hasil bumi. Dalam upacara ini biasanya dipentaskan beberapa kesenian seperti pentas anak, reog, campur sari, dan sebagainya. Desa Bejiharjo selain memiliki budaya dan kuliner yang dapat menambah daya tarik wisatawan juga memiliki sentra kerajinan. Sentra kerajinan yang dapat ditemui di desa ini yaitu sentra kerajinan

blangkon yang ada di Dusun Bulu. Banyak warga di dusun ini yang berprofesi sebagai pengrajin blangkon, berbagai jenis blangkon diproduksi setiap hari.

2. Kinerja Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo

Implementasi Program BKK di Desa Bejiharjo mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014. Regulasi tersebut menjelaskan deskripsi program sebagai panduan dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. Komponen program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam upaya pengentasan kemiskinan ini terdiri dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

a. Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2014 di Desa Bejiharjo sebesar Rp 234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk sasaran 234 RTS, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rumah Tangga Sasaran (RTS) diberikan bantuan keuangan dalam bentuk bantuan keuangan.
- 2) Masing-masing RTS menerima bantuan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan selama satu kali.
- 3) Kelompok sebagaimana dimaksud dibentuk berbasis desa sesuai wilayah RTS. Ketua kelompok menyampaikan bantuan kepada RTS untuk pemberdayaan ekonomi produktif.

b. Bantuan Teknis

Kegiatan BKK ini pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan meliputi peternakan kambing, peternakan ayam, dan stimulan usaha perdagangan oleh RTS yang terhimpun dalam kelompok. Pelaku utama kegiatan ini adalah RTS penerima manfaat yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 205/KEP/2013 yang ditingkat desa difasilitasi oleh pemerintah desa. Pada tingkat kabupaten, pelaku utama adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D) serta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dengan dukungan operasional dan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan.

Penggunaan dana BKK diperuntukkan bagi RTS dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui

pemberdayaan usaha ekonomi produktif, yaitu :

- a. Pengembangan usaha sesuai dengan bidang usaha yang digeluti, dan
- b. Mengembangkan usaha baru, baik dengan cara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan kelompok atau usaha yang direncanakan kelompok maupun usaha yang bersifat individu.

Usaha yang dapat dikembangkan dalam BKK dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal antara lain:

- a. Usaha primer pertanian produktif dan kreatif, yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
- b. Usaha yang bersifat olahan/home industri, dan;
- c. Usaha jasa produktif.

Implementasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205 /KEP/2013 Tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014. Implementasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun kedua, sedangkan tahun yang pertama adalah pada Tahun Anggaran 2013. Terdapat 8.335 Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada tahun 2014 tersebut dan pada implementasinya juga terealisasi 8.335 RTS (100 %) yang tersebar di 655 kelompok yang tersebar di delapan belas kecamatan.

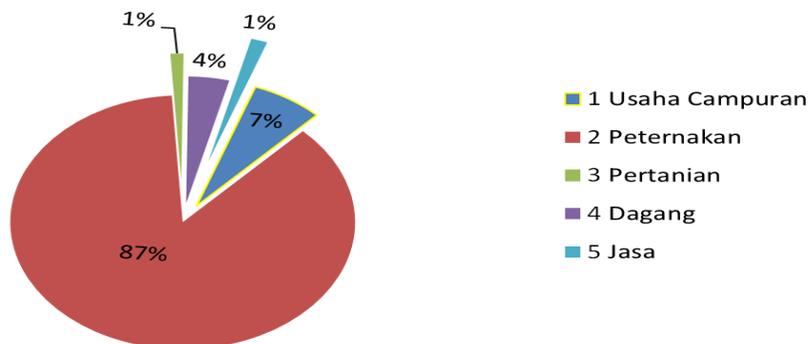
Berdasarkan buku APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014, Program BKK merupakan belanja bantuan social pengentasan kemiskinan. Adapun SKPD

Pelaksana adalah BAPPEDA yang berperan dalam menentukan kinerja implementasi program pengentasan kemiskinan melalui BKK tersebut. Sesuai dengan perspektif implementasi kebijakan, BAPPEDA adalah selaku koordinator implementasi kebijakan. Sebagai implementor, BAPPEDA membentuk Tim Koordinasi BKK tingkat Kabupaten yang melibatkan lintas SKPD terkait yang meliputi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dan Dinas Peternakan. Pada *level* kecamatan, melibatkan aparat kecamatan (Camat dan Kasi Kesejahteraan Sosial) dan para PPL Pertanian. Dalam rangkaian kelembagaan penanggulangan

kemiskinan, program BKK di bawah koordinasi langsung Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yaitu Wakil Bupati Gunungkidul.

Dana BKK disalurkan melalui kelompok usaha produktif. Usulan kelompok berbasiskan usaha individu atau usaha bersama. Pemerintah desa bersama pendamping (PPL Pertanian) melakukan verifikasi atas kelayakan usulan rencana kegiatan kelompok yang telah disusun oleh kelompok. Gambaran jenis usaha kelompok BKK Kabupaten Gunungkidul bisa dilihat dari Diagram berikut.

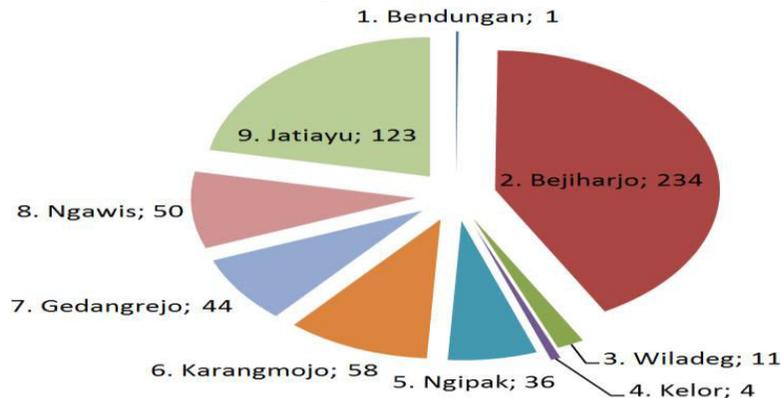
Diagram 1
Jenis Kegiatan Kelompok BKK Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014



Sumber : Data Sekunder Bappeda Kab. Gunungkidul, Tahun 2014

BKK Desa Bejiharjo terdapat 234 RTS yang tertinggi di Kecamatan Karangmaja (dari 558 RTS). Secara lebih rinci maka jumlah RTS masing-masing desa bisa dilihat pada Diagram berikut.

Diagram 2.
Data Jumlah RTS Tiap Desa di Kecamatan Karangmaja



Sumber : Data BKK, Bappeda Kabupaten Gunungkidul

Berdasar data Diagram 2 tersebut menunjukkan jumlah RTS Desa Bejiharjo sebanyak 234 RTS atau paling banyak dibandingkan Desa lainnya di Kecamatan Karangmojo. Desa Bendungan dan Desa Kelor tidak bisa membentuk kelompok sendiri karena jumlah RTSnya sedikit. Sesuai pendekatan kepatuhan (*compliance*) dalam implementasi program ini dengan mendasarkan pada acuan pembentukan kelompok sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul, bahwa kelompok minimal beranggotakan lima RTS. Desa Bendungan dan Desa Kelor bergabung menjadi satu kelompok sasaran bersama dengan Desa Wiladeg. Ketiga desa tersebut bergabung bersama membentuk kelompok Lestari Wiladeg 1 yang beranggotakan enam belas (16) RTS dengan Ketua kelompok Bapak Sumanto.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Priyanto Madya, M.Kes., Kabid Pemerintahan, Sosial, dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

“Secara regulasi bahwa RTS bisa membentuk kelompok untuk pengajuan usulan kegiatan produktif yang

dibiayai dari dana BKK. Jumlah anggota kelompok minimal lima, sehingga secara fungsi maka diharapkan bisa efektif”.

Dengan bergabungnya RTS dalam kelompok maka diharapkan fungsi kelompok bisa efektif dalam memecahkan atau menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota. Dengan demikian maka tujuan dari program BKK untuk mewujudkan masyarakat miskin menjadi lebih produktif dari sisi ekonomi bisa tercapai.

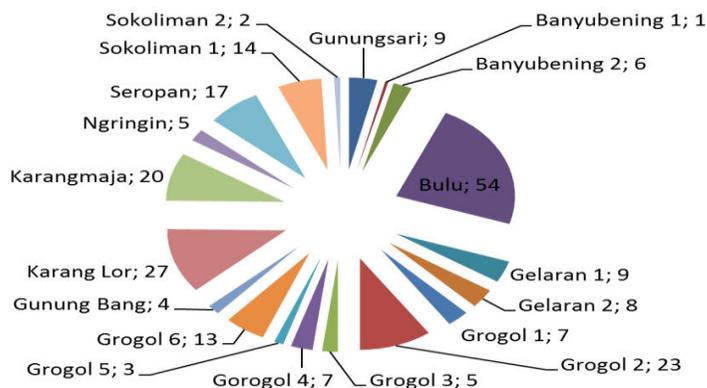
Banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah menysasar ke Desa Bejiharjo. Salah satu cara pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan yang digunakan melalui Program BKK adalah dengan menggunakan bantuan keuangan kepada rumah tangga miskin berbasis perorangan dalam mengatasi kemiskinan di tingkat warga sebagaimana program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang kini berubah nama menjadi BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan sebagainya.

Desa Bejiharjo merupakan salah satu sasaran lokasi implementasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam implementasi program ini menggunakan data sasaran RTS

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Penetapan RTS Penerima Bantuan BKK. RTS BKK tersebar hampir di semua padukuhanda di Desa Bejiharjo. Sebaran RTS bisa dilihat pada diagram berikut.

Diagram 3.
Prosentase RTS Tiap Padukuhanda Desa Bejiharjo



Sumber : TKPKD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2014.

RTS penerima dana BKK tahun 2014 yang tertinggi sebesar 54 RTS (23,08%) terdapat di Padukuhanda Bulu. Sedangkan Padukuhanda Banyubening 1 RTS-nya terkecil yaitu hanya satu (1) RTS saja. Sedang selebihnya tersebar di

tujuh belas (17) padukuhanda lainnya di Desa Bejiharjo. Adapun rincian data kelompok BKK Desa Bejiharjo Tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kelompok BKK Desa Bejiharjo Tahun 2014

No	Nama KSM	Nama Ketua	Dana (Rp.)
1	Karya Mandiri	Koniyanto	26.000.000
2	Ngudi Makmur	Dwi Harno	23.000.000
3	Manunggal Sehat	Lasiyo	8.000.000
4	Dadi Lancar	Wagiman Elang P	21.000.000
5	Usaha Maju	Suraji	20.000.000
6	Sejahtera	Paino	25.000.000
7	Mekar	Aris Budiyo	30.000.000
8	Maju Jaya	Gunanto	5.000.000
9	Sido Maju	Siswo Utomo	19.000.000
10	Suka Maju	Risam	9.000.000
11	Adem ayem	Sugito	8.000.000

No	Nama KSM	Nama Ketua	Dana (Rp.)
12	Serba Maju	Sahyo	21.000.000
13	Soko Tani	Sunanto	16.000.000
		Total	231.000.000

Sumber : TKPKD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2014.

Berdasarkan data awal calon penerima bantuan BKK sebanyak 234 RTS, terdapat 3 RTS tidak menerima bantuan karena sudah menerima bantuan pada tahun sebelumnya. Dari Tabel 1 maka terdapat 13 (tiga belas) kelompok RTS dengan anggota 231 RTS. Jumlah anggota kelompok terkecil beranggotakan lima RTS yaitu kelompok Majujaya, sedangkan kelompok Mekar anggotanya tiga puluh (30) RTS yang anggotanya terbanyak diantara kelompok lainnya di Desa Bejiharjo. Jumlah KSM di Desa Bejiharjo sebanyak 13 (tiga belas) KSM dengan jumlah anggota yang bervariasi dan 100 % bergerak pada usaha peternakan kambing.

Dalam hal pengorganisasian kelompok, masing-masing calon anggota kelompok mendapatkan sosialisasi di Balai Desa dari Pihak Pemerintah Desa bersama aparat Kecamatan dan PPL Pertanian. Mereka dijelaskan tentang maksud dan tujuan Program BKK, kemudian mereka sepakat untuk membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) BKK. Pendekatan berbasis kelompok merupakan pilihan pendekatan Program BKK yang dilaksanakan sejak tahun 2013. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014 bahwa RTS diarahkan untuk membentuk kelompok, karena pendekatan kelompok merupakan pendekatan yang diyakini lebih efektif daripada dengan pendekatan individu. Harapannya

dengan model kelompok ini akan lebih dinamis dalam pemberdayaan RTS menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut juga sesuai dengan ciri masyarakat Gunungkidul yang berjiwa gotong royong dan kerjasama.

Salah satu kelompok yang terbentuk yaitu Kelompok Serba Maju dengan Ketua Sahyo dan Bendahara Surani. Kelompok ini memanfaatkan dana BKK untuk kegiatan ternak kambing secara berkelompok. Disamping usaha pokok peternakan, juga melakukan aktivitas pertemuan dan media komunikasi kelompok pada malam Jum'at Pon dengan tempat bergilir. Kegiatan pertemuan telah berjalan sepuluh kali pertemuan, dimana setiap pertemuan tiap anggota menyeter dana delapan ribu rupiah untuk kegiatan arisan dan dua ribu rupiah untuk menambah kas kelompok secara swadaya dan mandiri. Sambil mengelola ternak mereka juga mengelola dana kas kelompok disimpan di bank Syariah. Kegiatan pertemuan rutin tersebut dalam rangka menjalin komunikasi diantara sesama anggota kelompok. Dituturkan oleh Sahyo, Ketua Pokmas Serba Maju sebagai berikut :

“dalam kelompok kami kami melakukan kegiatan pertemuan rutin setiap malam Jum'at Pon. Pertemuan tersebut diisi juga dengan kegiatan arisan. Dengan pertemuan yang tempatnya bergilir di rumah anggota maka diharapkan terjalin komunikasi kalau terjadi masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok”.

Namun demikian pada kenyataannya, fungsi dari kelompok-

kelompok yang dibentuk atas dasar munculnya Program BKK di Desa Bejiharjo ini masih sebatas untuk kepentingan penyaluran bantuan semata. Untuk tindak lanjut berfungsinya kelompok sebagai media organisasi warga dalam penanggulangan kemiskinan, nampaknya belum bisa berfungsi secara optimal. Pasca pembentukan kelompok memang sudah ada kegiatan berupa pertemuan rutin kelompok, kegiatan sosial, akan tetapi belum menyentuh pada kegiatan ekonomis produktif yang menasar pada bagaimana memelihara ternak. Harapannya dengan usaha kecil di bidang peternakan, mereka akan tumbuh menjadi keluarga sejahtera yang kuat, ternaknya akan berkembang banyak dan mengentaskan mereka dari kemiskinan. Cita-cita untuk mewujudkan Gunungkidul sebagai gudang ternak harapannya akan tercapai.

Dari hasil observasi, sebenarnya RTS juga mempunyai semangat dan mimpi yang tinggi akan hal tersebut, tetapi nampaknya dari desain BKK tersebut belum memenuhi skala kegiatan ideal untuk penanggulangan kemiskinan, khususnya secara ekonomi karena nilai bantuan sebesar Rp 1.000.000 masih terlalu kecil karena untuk membeli kambing baru mendapatkan satu ekor kambing dengan rata-rata harga kambing per ekor Rp 1.000.000. Oleh karena itu masih perlu dukungan kegiatan dari lintas SKPD yang lain. Syahyo menuturkan bahwa jika kelompok berkembang maka pernah ada informasi dari Dinas Peternakan akan adanya stimulan pengembangan ternak kelompok. Dengan adanya program lanjutan ini maka peluang keberhasilan program dalam mewujudkan kesejahteraan tentunya akan menjadi semakin besar

Dari aspek penyiapan data kelompok sasaran, tidak ada

permasalahan dalam implementasi program BKK karena data sudah ditetapkan secara *top down*, sedangkan tugas implementor adalah melakukan verifikasi agar tidak terjadi duplikasi penerima bantuan. Adapun penggantian nama bilamana terjadi RTS menerima bantuan berturut-turut harus ditetapkan SK Bupati tentang Penetapan Nama Pengganti RTS dengan merujuk pada regulasi tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Bantuan BKK di Desa Bejiharjo sudah disalurkan 100 % artinya semua RTS yang terdaftar sebagai kelompok sasaran telah menerima Bantuan BKK masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Bantuan tersebut diterima secara utuh karena mekanisme pencairan Bantuan melalui Rekening Bank dalam hal ini Bank BPR Bank Daerah Gunungkidul (BPR BDG) sebagai pihak Bank yang menjadi Mitra BAPPEDA dalam pencairan dana. Struktur Bank BDG sebagai Bank Penyalur dirasakan cukup mudah dalam penyaluran karena di Kecamatan Karangmojo sudah ada Kantor Kas Bank BDG sehingga tidak terlalu jauh jaraknya dari Bejiharjo ke Kantor Kas yang menyatu dengan Kantor Kecamatan. Pada saat pencairan dana, pihak PPL, dan Kecamatan mengadakan pemantauan di lapangan untuk ikut mendorong dan memastikan dana bantuan betul-betul sudah dicairkan, dan selanjutnya diarahkan penggunaannya untuk usaha ekonomis produktif, yang sebagian besar untuk usaha peternakan kambing dan ayam.

Dalam hal mekanisme penyaluran bantuan tidak ada persoalan dan jumlah bantuan sudah diterima sebagaimana yang ditetapkan. Skala bantuan BKK sebesar Rp.1.000.000 merupakan besaran yang sudah ditetapkan secara tetap dan tidak berubah besaran bantuan setiap RTS

berdasarkan Dokumen APBD DIY melalui rekening Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan analisis usaha ekonomis produktif, uang sebesar Rp. 1.000.000,- cukup untuk membeli seekor kambing yang rata-rata harga pasaran sebesar Rp. 800.000 sampai dengan Rp.1.000.000,-. Berdasarkan analisis usaha peternakan idealnya jumlah ternak yang dibantu sejumlah 3 (tiga) ekor dengan komposisi dua betina dan satu jantan atau kalau dikalkulasi sebesar Rp. 3.000.000,-.

Usaha peternakan kambing pada dasarnya merupakan usaha yang prospektif bagi peningkatan pendapatan masyarakat, namun demikian daya ungkit penanggulangan kemiskinan akan lebih cepat bilamana jumlah ternak yang dipelihara lebih banyak. Kenyataan di lapangan, salah satu anggota kelompok Serba maju yaitu Wanidi merupakan warga yang cacat dan bermatapencaharian serabutan. Istrinya pun juga bekerja serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu. Dengan anak tiga maka usaha seekor kambing ini sulit untuk mengangkat derajat kehidupannya. Diturunkan oleh Subardiyo, Bagian Kesra Pemerintah desa Bejiharjo :

“Kondisi anggota kelompok bernama Wanidi, sehari-hari kehidupannya sangat sulit. Dengan memelihara seekor kambing maka sulit untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih”

Hal lain pada kambing anggota Kelompok Suka maju milik Mujahidin Arif Sagiyo, disampaikan oleh istrinya :

“Kambing BKK saya sekarang ini sudah saya jual Bu, kangge *betah*, besok kalau sudah ada uang akan beli lagi sebagai gantinya”.

Hal ini juga diinformasikan oleh Paliyo, Bendahara Kelompok Suka Maju, bahwa kambing anggota kelompok yang bernama Arif telah dijual. Namun anggota tersebut berniat akan mengganti, membeli lagi kalau sudah punya uang karena kambing BKK harus diuri-uri agar bisa memberikan tambahan penghasilan bagi anggotanya.

Hampir sama ketika dilakukan wawancara dengan istri Sudaryanto seorang anggota kelompok Karya Mandiri, bahwa usaha ternak ayam yang mendapatkan modal dana BKK satu juta rupiah sudah tidak lagi berlanjut. Diturunkan sebagai berikut:

“Dulu dana BKK kami gunakan untuk membeli dua ayam betina dan dua ayam jantan. Selain itu dananya kami gunakan untuk membuat kandang ayam. Karena saat itu musim penghujan, maka ayamnya mati”.

Ternyata ayam keluarga Sudaryanto sudah tidak ada. Tujuan untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan yang distimulir dana BKK tentu saja tidak akan terwujud.

Namun tetangga Ibu Sudaryanto, Ibu Sugihartono yang juga memelihara ayam dari dana BKK mengatakan bahwa dua babon ayam yang dipeliharanya sudah *ngirit* sembilan ayam dan tujuh anak ayam. Sedangkan satu babon lagi baru *angrem*. Dikatakan Ibu Sugihartono:

“Ayam babon yang saya beli ketika bertelur maka saya *angremke* supaya ayam bisa bertambah. Selain itu juga saya bisa memasak telur untuk lauk sebagai tambahan gizi keluarga”.

Ternak ayam ini sangat membantu keluarganya karena suaminya hanya bekerja sebagai juru kunci pemakaman di desa Bejiharjo, dan dia sendiri juga sudah tidak kuat bekerja keras karena pernah menjalani operasi.

Apalagi keluarga Sugihartono masih punya tanggungan satu anak (dari empat anaknya) dan tiga cucunya yang harus menjadi tugas tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhannya.

Meskipun harus diakui bahwa ciri khas masyarakat Gunungkidul, sebagaimana halnya masyarakat di Desa Bejiharjo dalam penghidupannya tidak semata-mata mengandalkan pencahariannya pada satu sektor saja. Apabila hanya bertumpu pada pertanian tanaman pangan saja, atau perikanan saja atau peternakan saja, sehingga usaha peternakan yang dikelola berdasarkan program BKK dalam praktek keseharian RTS dikombinasikan dengan usaha sektor lainnya secara terpadu. Terlebih lagi Desa Bejiharjo merupakan daerah kawasan desa wisata dan desa budaya yang cukup prospektif sehingga bentuk strategi untuk bertahan hidup rumah tangga miskin ditopang oleh berbagai sumber penghidupan. Usaha peternakan sendiri pada dasarnya juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari sektor yang lain karena dalam peternakan kendalanya adalah pakan ternak. Pakan ternak ini akan sangat terbantu mana kala RTS mempunyai lahan yang ditanami rumput-rumputan.

Sebagai ilustrasi tentang perkembangan BKK dapat ditunjukkan oleh RTS bernama Paliyo. Kambing BKK sudah beranak dua. Paliyo juga mempunyai seekor kambing dan seekor sapi yang sudah beranak pula. Disamping beternak Paliyo ikut memelihara perkebunan kayu putih dan berprofesi sebagai pemandu wisata di area Goa Pindul. Berkat usahanya Paliyo mampu mencukupi kebutuhan seorang anaknya yang sudah kuliah di UIN dan dua anaknya yang masih sekolah di SD.

Selain Paliyo, ada keluarga sejenis seperti Syalyo, yang juga turut bekerja mengelola perkebunan kayu putih sehingga bisa menanam rumput

untuk makanan ternaknya. Selain itu juga kalau ada tetangga yang membutuhkan tenaga, maka Syalyo juga bisa nukang. Jadi kambing sebagai pelengkap untuk meningkatkan mata pencaharian keluarganya yang beranak dua di SMP, dua SD, dan satu sekolah di PAUD. Dituturkan oleh Syalyo sebagai berikut :

“Kangge nyekapi kebutuhan makanan ternak maka saya menanam rumput di perkebunan yang kami garap. Selain itu saya juga bekerja sebagai tukang bangunan kalau ada warga yang membutuhkan tenaga”.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan melalui BKK di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kab. Gunungkidul

a. Kondisi Lingkungan (*Environment Condition*)

Kondisi lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi program BKK. Lingkungan yang melingkupi implementasi program BKK meliputi lingkungan fisik, biotik, dan lingkungan sosial ekonomi. Lingkungan fisik Desa Bejiharjo bersifat unik karena merupakan kawasan karst dan merupakan bagian *Geopark* Gunungsewu yang didalamnya terdapat obyek wisata Goa Pindul. Dibagian utara Desa ini terdapat Situs dan Cagar Budaya Sokoliman yang sedang dikembangkan kawasannya oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan.

Dengan kondisi lingkungan fisik berupa kawasan karst ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja implementasi Program BKK. Aspek lingkungan yang lain yaitu lingkungan biotik yang berkenaan dengan lingkungan hidup, dengan suasana Desa Bejiharjo yang cukup dengan sumber air permukaan dan air bawah tanah yang melimpah serta dilalui oleh Sungai Oya menyebabkan tanaman atau tumbuhan bisa hijau sepanjang tahun. Hijauan pakan ternak bisa relatif tersedia di wilayah Desa Bejiharjo. Terlebih lagi hamparan sawah dan tanaman pangan lainnya bisa tumbuh sepanjang tahun dengan suasana yang hijau royo-royo. Atas dasar hal tersebut Desa Bejiharjo ditetapkan sebagai Desa Agropolitan. Dalam konteks Program BKK ini yang pilihan kegiatan RTS-nya dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan ini hampir

100 % bergerak dalam peternakan kambing, maka ketersediaan lingkungan yang mendukung dalam hal ini seperti ketersediaan pakan ternak yang memadai akan berkorelasi positif dengan keberhasilan dalam budidaya ternak. Dukungan lingkungan biotik seperti dituturkan oleh Paliyo dan Syalyo yang turut mengelola perkebunan kayu putih di atas. Namun juga disampaikan oleh Lasmi seorang anggota kelompok BKK Suka Maju, asal warga mau gerak maka pakan ternak masih bisa didapatkan. Dikatakan oleh Lasmi seorang janda beranak tiga (dua diantaranya sudah bekerja dan seorang anaknya sekolah SMP) sebagai berikut:

“asal masih mau gerak maka warga bisa mendapatkan pakan ternak seperti daun mahoni dari ladang atau pekarangan sekitar. Namun begitu kadang juga masih harus beli. Namun intinya pakan ternak walaupun musim kemarau tidak menjadi masalah bagi saya”.

Sementara lingkungan sosial ekonomi di Desa Bejiharjo juga berpengaruh pada kinerja implementasi program BKK. Kondisi lingkungan sosial dengan struktur sosial masyarakat yang cukup bervariasi. Lingkungan sosial budaya yang melingkupi masyarakat adalah sehubungan Desa Bejiharjo merupakan kawasan Desa Wisata dengan andalan obyek wisatanya Goa Pindul. Telah terjadi kondisi sosial ekonomi dalam hal pekerjaan masyarakat, yang mulai mengarah pada pekerjaan ganda. Para penerima bantuan BKK cenderung memiliki pekerjaan ganda. Selain pekerjaan utama, yang sebagian besar di sektor pertanian, mereka juga bekerja di luar sektor pertanian yaitu di pekerjaan kepariwisataaan. Pola ini boleh jadi merupakan mekanisme keluarga miskin dalam rangka untuk mendapatkan

penghasilan tambahan dari luar sektor pertanian, berhubungan penghasilan dari sektor pertanian kurang memadai bagi kelompok keluarga miskin tersebut. Rendahnya penghasilan dari sektor pertanian bagi keluarga miskin (anggota kelompok/Pokmas) terutama disebabkan karena memang lahan pertanian mereka rata-rata lebih sempit dibanding keluarga yang tidak mendapatkan bantuan BKK (Non Pokmas), yang diasumsikan lebih kaya. Mereka yang termasuk keluarga Non Penerima BKK, rata-rata memiliki lahan pertanian dan pekarangan yang lebih luas sehingga dapat mengandalkan hasil pertanian dan kebunnya, dengan membudidayakan lahan dan pekarangannya untuk tanaman keras serta tanaman pangan.

Data di lapangan menunjukkan kelompok penerima BKK, meskipun rata-rata kepemilikan lahannya sempit, mereka tetap bertahan (*survival*), bahkan mereka tetap mengoptimalkan kegunaan lahan yang lebih sempit untuk budidaya ternak BKK. Namun demikian, mereka rata-rata *income* per bulannya tetap lebih rendah dari keluarga Non Pokmas. Program BKK yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi penerima BKK sehingga diperlukan strategi bertahan hidup (*survival*) tersendiri. Strategi bertahan hidup seperti yang dilakukan oleh Ibu Lasmi yang dituturkan ketika wawancara dilakukan, sebagai berikut:

“baru buruh Bu, menanam padi. Sehari-hari saya kalau tenaga ada yang

membutuhkan, maka saya buruh juga untuk mendapatkan uang agar bisa mencukupi kebutuhan anak-anak”

Pernyataan itulah yang disampaikan oleh seorang anggota kelompok ternak BKK. Ibu tersebut selain memelihara kambing juga bekerja sebagai buruh serabutan untuk menopang kebutuhannya sehari-hari.

Sedangkan lingkungan politik, seperti adanya konflik masyarakat dalam pengelolaan Goa Pindul tidak berpengaruh pada kegiatan BKK. Kondisi masyarakat yang bergerak dalam kegiatan BKK adalah masyarakat miskin yang sebagian besar tidak bekerja dibidang jasa wisata seperti jasa pemanduan dan penyewaan pelampung. Namun ada juga anggota BKK, Paliyo yang juga turut sebagai pemandu wisata di area wisata Pindul. Diungkapkan oleh Paliyo :

“Tiap Rabu Kamis saya bertugas sebagai pemandu wisata di Pindul-Sungai Oya. Kami bergantian dengan warga lain dalam mengelola jasa wisata Panca Wisata”.

Namun kegiatan Paliyo sehari-hari baik sebagai pemandu wisata dan usaha ternak kambing, bisa berjalan beriringan. Kegiatan sebagai pemandu wisata bisa berjalan, demikian juga hewan ternaknya juga bisa beranak dan berkembang. Berdasar kondisi di Desa Bejiharjo, maka kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi ternyata berpengaruh terhadap kinerja implementasi program BKK.

**b. Hubungan antar organisasi
(*inter - organizational
relationships*)**

Dalam pelaksanaan kegiatan BKK melibatkan pihak BAPPEDA, BP2KP, dan tenaga PPL. Keterkaitan peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut sangat dirasakan manfaatnya dalam implementasi program BKK. Jenis kegiatan usaha kelompok BKK di Desa Bejiharjo semuanya ternak kambing. Peran PPL pertanian dan BP2KP sangat vital dalam pendampingan teknis, diantaranya : pemberian obat cacing, pemberian vitamin, dan teknis pemeliharaan kambing yang benar. Seperti diungkapkan oleh seorang Syahyo, sebagai berikut:

“Hewan ternak kami berupa kambing mendapatkan vaksin dan obat cacing oleh mantri hewan. Fungsi vaksin yaitu supaya kambing kami kebal dan tidak penyakitan”.

Dalam implementasi program BKK juga menonjol aspek kerjasama organisasi dengan kelompok masyarakat yang menerima program BKK. Bentuk kerjasama yang paling sederhana dapat kita lihat pada kerjasama melalui organisasi kelompok. Disamping itu, peran masyarakat sangatlah penting. RTS yang bergabung dalam kelompok sangat vital bagi keberlanjutan kegiatan kelompok. Seperti diungkap oleh Syahyo :

“Kami selaku warga merasakan betul bahwa untuk berlangsungnya Program BKK ini kami harus saling kerjasama dalam pembentukan kelompok”.

Kerjasama juga ditunjukkan oleh kerjasama PPL dengan kelompok itu sendiri. Pihak PPL sangat menaruh perhatian pada perkembangan kelompok. Seperti diungkap oleh Syahyo :

“ Kelompok disini mendapatkan pembinaan rutin dari PPL. Bahkan PPL menaruh perhatian khusus terhadap BKK ini dengan akan mencarikan bantuan tambahan ternak ke Dinas Peternakan”.

BKK.

Disampaikan oleh seorang anggota Kelompok Suka Maju bernama Lasmi :

“Kami (kelompok) sudah mengerti kok bu tentang tujuan BKK, dulu ketika sosialisasi tentang BKK sudah dijelaskan tentang tujuan BKK untuk meningkatkan pendapatan oleh karena itu supaya berlanjut gitu, maka kambingnya nanti tidak boleh dijual”.

BAPPEDA maupun dari BPMPKB. Kegiatan dalam rangka berbagi peran diantara mereka dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kegiatan BKK, koordinasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Peran pemerintah desa disampaikan oleh Bapak Subardiyo Selaku Kesra Desa Bejiharjo, sebagai berikut :

“Kami bersama dengan Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) memfasilitasi proses pembentukan kelompok. Dilakukan verifikasi RTS calon penerima dana BKK. RTS yang layak menerima dana BKK maka difasilitasi pembentukan kelompok sebagai syarat pencairan dana BKK”.

Peran pelaku lain juga dioptimalkan melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi. Apabila dari pemerintah desa ada hal yang belum jelas maka pemerintah desa melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan ataupun kabupaten. Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan

pemerintah kecamatan. Disampaikan oleh Sudadi, SKM, Kasubbid Sosial dan Budaya Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul :

“Pada tahap awal kami melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Kami memaparkan tentang segala hal seluk beluk yang terkait dengan program BKK, mulai dari apa tujuan program BKK, bagaimana tahapan kegiatannya di tingkat masyarakat, siapa penerima manfaat dari program ini, dan sebagainya “.

Dengan adanya sosialisasi maka para pelaku akan mendapatkan pemahaman tentang program. Pemahaman dari berbagai pihak tersebut akan meminimalisir kekurangtepatan implementasi kegiatan. Sehingga meminimalisir potensi konflik yang mungkin terjadi di masyarakat.

Dalam hal efektivitas hubungan antar unit-unit administrasi, tergambar dalam bentuk konsep prinsip keterpaduan, yang dijalankan oleh BKK apabila kegiatan yang dilaksanakan terkait dan terpadu dengan kegiatan lain di desa sehingga saling mendukung dan memberikan manfaat secara optimal. Keterpaduan kegiatan ini menyangkut lokasi, dana, dan penyaluran bantuan, serta para pelaku di lapangan.

Salah satu indikator keterpaduan dalam implementasi Program BKK adalah Kecamatan telah menyediakan dana pendamping program BKK berupa kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Di tingkat kecamatan memang tidak dibentuk Tim Koordinasi Khusus Program BKK, tetapi Pihak Kecamatan telah menjalin koordinasi dengan berbagai pihak dalam implementasi Program BKK. Di tingkat Kecamatan

pembinaan dikoordinasi langsung oleh Camat dibantu Kasi Kesejahteraan Sosial. Bentuk pembinaan adalah kunjungan tatap muka di desa, rapat rutin koordinasi, dan pembuatan pedoman tertulis dalam hal pembuatan proposal tertulis tentang pelaksanaan program di tingkat desa (misalnya : mengenai prosedur pencairan dana di Bank BPR BDG, sistem pengelolaan Dana BKK dan pengamanan keuangan kelompok). Tugas utama Camat dan Kasi Kesejahteraan Sosial lebih dititik beratkan pada penyampaian informasi dari Kecamatan dan Pengumpulan Data dari Pokmas untuk Laporan ke Kabupaten. Sejauhmanakah keterpaduan implementasi BKK yang menggambarkan hubungan inter organisasi di atas ? Secara umum keterpaduan yang ditunjukkan dengan koordinasi masing-masing anggota tim dapat dikatakan baik, namun demikian beberapa unsur pelaku, ditemukan bahwa koordinasi masih harus ditingkatkan.

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program lebih baik antara lain : (1) pembinaan terhadap kelompok tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi agar lebih berorientasi pada pengembangan kewirausahaan melalui pengetahuan ekonomis praktis dengan penyampaian secara sederhana dan mudah dimengerti; (2) perlu tersedianya sumber informasi mengenai permasalahan pengelolaan ternak.

c. Sumber daya untuk pelaksanaan program (resources for programme implementation)

Pembahasan tentang sumber daya untuk pelaksanaan program secara konseptual dibagi menjadi dua yaitu sumber daya kelompok sasaran dan sumber daya pelaksana program.

Sumber daya kelompok sasaran BKK dalam pembahasan ini menekankan pada sumber daya yang berkaitan dengan kondisi aset oleh masyarakat dalam kaitannya dengan kondisi penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya program atau aset yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi BKK yang digunakan oleh masyarakat untuk melanjutkan penghidupannya terdiri dari 5 (lima) jenis yang satu sama lain saling terkait. Lima sumber daya atau aset tersebut dalam kerangka penghidupan berkelanjutan dikenal dengan istilah *pentagonal aset*, yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber daya fisik (infrastruktur), sumber daya ekonomi keuangan, dan sumber daya sosial.

Secara umum kualitas SDM yaitu menyangkut pendidikan dan ketrampilan. Secara umum pula bahwa aspek pendidikan dari kelompok BKK, rata-rata berpendidikan rendah atau setingkat SD. Sedangkan ketrampilan, yang dimiliki oleh kelompok BKK, dapat ditunjukkan dalam hal ketrampilan bertani termasuk beternak yang sudah didapatkan dari turun temurun, seperti diungkapkan oleh Ibu Lasmi, sebagai berikut:

“Kalau ketrampilan bertani dan beternak masyarakat Bejiharjo sendiri sudah dikuasai sejak turun menurun sehingga tidak masalah ketika mereka mengelola bantuan BKK untuk pengembangan usaha peternakan”.

Berdasar ilmu *titen*, penerima BKK yang telah lama ternak kambing menyatakan bahwa kalau kambingnya tidak mau makan, maka sudah tahu cara penanganannya. Demikian juga kalau hanya penyakit ringan kambing, sudah bisa mengetahui sehingga tidak berakibat fatal pada kambingnya.

Sedangkan sumber daya alam sebagai pendukung kelompok untuk

implementasi BKK yang dimiliki kelompok adalah lahan pertanian serta mata air. Lokasi strategis desa menunjukkan lahan pertanian tidak jauh dari pemukiman dan jalan raya. Kondisi tanah terdapat lokasi yang subur dan lahan yang tidak subur, terdapat juga tanah yang terkikis semacam terkena banjir. Tanaman pangan masih mendominasi, seperti padi dan tanaman sayuran dan sebagainya yang mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bagi kelompok yang mempunyai lahan pertanian akan sangat cocok dan mendukung peternakan, karena di sela-sela tanaman pertanian dapat ditanami tanaman hijauan makanan ternak (HMT) karena dengan HMT yang cukup maka hewan ternak akan terjamin makanannya. Diungkapkan oleh Bapak Paliyo, sebagai berikut:

“Kebetulan saya itu mempunyai sedikit lahan meskipun bukan sawah saya tanami tanaman pangan dan juga ditanami rumput-rumputan, suket gajah (*Jawa*) untuk makanan kambing, jadi soal pakan kami tidak masalah karena ada lahan”.

Potensi sumber mata air cukup banyak terdapat di sekitar sungai Oya yang memanjang menyusuri Desa Bejiharjo. Sumber air ini biasa digunakan untuk kebutuhan mandi, masak, mencuci, dan juga untuk kebutuhan minum hewan ternak.

Kondisi sumber daya fisik infrastruktur Desa Bejiharjo sudah cukup bagus, telah terbangun jalan dengan kualitas aspal dengan *hotmix* sehingga jalur transportasi di Desa Bejiharjo cukup lancar dan bahkan sampai malam

tetap bisa berfungsi karena penerangan jalan sudah relatif memadai. Jalan utama yang menghubungkan dimulai dari titik ring road selatan masuk lewat Dusun Grogol yang merupakan Jalan Kabupaten membujur sampai ke Sokoliman. Semua dusun bisa dicapai dengan mudah menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Akses masyarakat ke lahan pertanian umumnya dicapai dengan kendaraan bermotor, jalan kaki, bersepeda bagi yang memiliki. Kondisi infrastruktur desa yang semakin berkembang dapat ikut membantu dan merubah orientasi masyarakat ke arah pergerakan ekonomi, dimana melalui Program BKK ikut terpengaruh secara positif.

Sedangkan terkait dengan sumber daya berupa modal sosial dapat digambarkan melalui berbagai kegiatan di Desa Bejiharjo yang semakin marak terutama kegiatan bersih desa, keagamaan, kegiatan sosial, dan aktivitas kepariwisataan. Kelompok arisan juga muncul namun terbatas pada yang memiliki uang. Ada pula kerjasama kelompok dalam pengolahan lahan pertanian secara bergantian. Kegiatan adat istiadat juga masih berjalan seperti Rasulan, diungkapkan oleh Ibu Paliyo sebagai berikut:

“Di Bejiharjo ini banyak kegiatan arisan baik ibu ibu maupun bapak-bapak, juga kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong masih tinggi. Kalau setiap tahun di desa ini masih dilaksanakan rasulan”.

Sumber daya dapat dilihat baik dari aspek ketersediaan dana yang memadai dan kontrol terhadap anggaran itu sendiri, dukungan baik secara administratif dan teknik, adanya alokasi anggaran yang mencukupi, dan penerimaan sumberdaya oleh pelaksana yang berkesinambungan. Dana yang

disediakan untuk anggaran BKK, cukup memadai namun demikian belum bisa menysasar ke seluruh RTM yang tercatat sebagai keluarga miskin, karena dana BKK sudah ditentukan jumlahnya dari APBD DIY yang dijabarkan peruntukannya sesuai data rekapitulasi masing-masing desa. Sedangkan aspek kontrol anggaran, masih bersifat minim karena memang besaran anggaran sudah diplot dari atas. Kontrol disini lebih diartikan sebagai keleluasaan dalam pengambilan keputusan anggaran tersebut.

Bentuk dukungan administratif dan teknis juga berpengaruh terhadap implementasi BKK. Dukungan administratif yang dilakukan di wilayah Kecamatan Karangmojo yaitu pihak kecamatan ikut memberikan akses kemudahan bagi warga miskin atau RTM melalui pendataan dan verifikasi Calon Penerima BKK. Sedangkan aspek teknis lebih pada pengetahuan dan peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan dan budidaya ternak yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan PPL Peternakan.

Besarnya anggaran pendampingan administrasi kegiatan masih kurang memadai, karena pembinaan keberlanjutan program tidak dianggarkan oleh SKPD. Dalam hal keberlanjutan program ini belum ada keputusan, pihak SKPD mana yang bertugas mendampingi. Kalau secara tupoksi diserahkan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi karena dirunut dari mata anggaran BKK ini adalah berupa Bansos, sehingga lebih tepat kalau di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Diungkapkan oleh Bapak Sri Hartanta, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

“Ke depan kalau masih ada Program BKK, pengampu program akan kita usulkan untuk dialihkan ke Dinas

Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, karena kegiatan ini berupa Bansos sehingga lebih tepat disana secara tugas pokok dan fungsi SKPD, Bappeda sifatnya lebih ke koordinatif dan evaluasi saja atau kalau mau menekankan aspek pemberdayaan ya lebih tepat ke BPMPKB. Tugas BAPPEDA lebih banyak mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagai sekretariat TKPKD”.

Untuk aspek pemberdayaan kelompok menjadi ketugasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB. Selanjutnya tentang teknis budidaya ternak menjadi ketugasan Dinas Peternakan. Namun, sampai sekarang belum dialokasikan dana/anggaran untuk pendampingan teknis kelompok.

d. Karakteristik pelaksana (characteristic of implementing agencies)

Karakteristik pelaksana dilihat dari : kemampuan para pelaksana dalam hal kemampuan teknik, managerial, dan politik, serta kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengintegrasikan setiap keputusan, baik yang berasal dari sub-sub unit organisasi, maupun dari lembaga politik nasional dan pejabat pemerintah pusat lainnya.

Salah satu hal menonjol dari karakteristik pelaksana adalah kemampuan para pelaksana dalam aspek teknik, managerial, dan manajemen politik lokal. Dalam hal kemampuan teknik dan managerial, para implementor BKK di Kecamatan Karangmojo termasuk di Desa Bejiharjo sudah cukup memadai. PPL sudah berpengalaman mendampingi kelompok tani dan terlibat dalam berbagai program pemberdayaan petani kecil. Secara managerial, pengalaman para PPL adalah ketika mereka mendampingi program FEATI sebuah program

pemberdayaan petani dari Kementerian Pertanian, ketika itu di tingkat Desa harus dibentuk Gapoktan dan terjabarkan ke dalam Kelompok Tani. Pengalaman tersebut secara managerial diterapkan ketika pembentukan kelompok BKK agar mengarah ke usaha ekonomis produktif, dengan suatu wawasan kelompok berbasis RTS yang miskin potensial produktif (MPP), tetapi terkendala aspek sumber daya anggaran untuk pendampingan lanjut yang sudah tidak dianggarkan.

Dalam hal kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengintegrasikan setiap keputusan, baik yang berasal dari sub-sub unit organisasi, maupun dukungan dari lembaga politik nasional, dan pejabat pemerintah pusat lainnya, juga cukup memadai. Pada tahap perencanaan para pelaksana secara khusus terlibat aktif dan mengkoordinasikan kelompok sejak pembentukan kelompok tersebut, terlebih PPL yang secara spesifik dan teknis sering berhubungan dengan kegiatan pendampingan kelompok.

Pada tahap perencanaan para pelaksana secara khusus terlibat aktif dan mengkoordinasikan kelompok sejak pembentukan kelompok tersebut, terlebih PPL yang secara spesifik dan teknis sering berhubungan dengan kegiatan pendampingan kelompok, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syahyo, salah seorang anggota kelompok sebagai berikut:

“PPL Pertanian di Desa Bejiharjo ini sangat aktif membina pertanian, termasuk dalam hal budidaya ternak, dan sering mendatangi kami. Mereka cukup pengalaman, *wong* mereka itu klan ahlinya dibidang pertanian termasuk peternakan dan sering menjadi *parang pitakonon* bagi kami”.

Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah yang

menerapkan kebijakan penyuluh yang bersifat *Poli Phonen* artinya satu orang penyuluh harus multitalenta, generalis, mumpuni, dan dalam penempatannya mengarah pada satu desa satu penyuluh. Karakter penyuluh yang ditemukan di lapangan adalah mereka mampu menjadi seorang komunikator, *role model*, *agent of change*, dan *leader opinion*.

Bagaimana dengan peranan Kecamatan yang juga bertugas membina kelompok-kelompok. Selama ini Kecamatan sudah ada semangat dan niatan untuk terus terjun dalam pemberdayaan masyarakat, seperti pengalaman pada saat PNPM MPd. Tetapi untuk kegiatan APBD semacam BKK, pihak kecamatan ketika mengusulkan kegiatan baru untuk pendampingan lanjut mereka terkendala nomenklatur kegiatan dan kewenangan kecamatan dalam teknis pendampingan kemiskinan. Kemampuan pihak pelaksana untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengintegrasikan setiap keputusan, baik yang berasal dari sub-sub unit organisasi, maupun dukungan dari lembaga lain, dipandang sudah cukup memadai. Hal tersebut ditunjukkan oleh dokumen-dokumen usulan kelompok, dan notulen rapat pada tingkat desa serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses koordinasi program BKK.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini memfokuskan pada aspek kinerja implementasi program BKK dan belum mampu menjangkau secara sosiologis yang lebih mendalam tentang dinamika aspek kehidupan dan kemiskinan yang dihadapi penduduk miskin. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian

- tentang aspek sosiologis bagaimana strategi bertahan hidup dan menghadapi tekanan bagi masyarakat miskin
2. Bahwa dalam implementasi Program BKK di Desa Bejiharjo, berdasarkan indikator implementasi kebijakan secara umum telah berorientasi pada pendekatan kepatuhan (*compliance*), artinya dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur implementasi sebagai mana tertuang pada Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati. Meskipun sampai saat ini Program BKK belum dapat dikatakan mampu mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan karena keterbatasan dana pada masing-masing RTS dan pelaksanaan program yang baru berjalan 2 (dua) tahun, namun setidaknya program tersebut telah mampu menggerakkan sosial ekonomi masyarakat anggota RTS menuju ke arah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Kinerja implementasi dapat dilihat dari aspek keberhasilan implementasi BKK di lapangan yang melibatkan banyak aktor pelaksana kebijakan.
3. Kinerja implementasi Program BKK di Desa Bejiharjo dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan yang menyangkut aspek alam, social, dan ekonomi
4. Kinerja implementasi program BKK di Desa Bejiharjo dipengaruhi oleh hubungan antar organisasi pelaksana program dari tingkat kabupaten sampai ke desa atau dengan istilah lain adalah adanya koordinasi antar berbagai pihak dalam

implementasi program yaitu antara TKPKD, BAPPEDA, BP2KP, PPL Pertanian, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.

5. Kinerja implementasi program BKK di Desa Bejiharjo ditentukan oleh faktor sumber daya yang mendukung implementasi program baik sumber daya kelompok sasaran program (RTS) dan sumber daya pelaksana program.
6. Kinerja implementasi program BKK di Desa Bejiharjo dipengaruhi oleh karakteristik pelaksana berupa kemampuan pelaksana dalam hal kemampuan teknik, managerial, politik, serta kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengintegrasikan semua keputusan dalam program BKK ini.
7. Kinerja implementasi Program BKK sudah baik dari segi proses dan hasil (*outcomes*), namun untuk aspek dampak (*impact*) ke depannya masih harus dilakukan penelitian pasca program BKK.

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan program BKK dimasa datang lebih baik maka diperlukan : pembinaan terhadap kelompok tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi agar lebih berorientasi pada pengembangan kewirausahaan melalui pengetahuan ekonomis praktis dengan penyampaian secara sederhana dan mudah dimengerti dan perlunya pemerintah menyediakan sumber informasi mengenai permasalahan pengelolaan ternak.
2. Program BKK perlu ditunjang oleh program-program penanggulangan kemiskinan yang lainnya sehingga terjadi keterpaduan dan sinergisme program penanggulangan kemiskinan. Sebagai contoh Program BKK ditunjang dengan Program Pelatihan Ekonomi Produktif seperti : Pelatihan Budi Daya Ternak dan lain-lain.
3. Untuk keberlanjutan Program BKK maka hubungan antar organisasi pelaksana atau dalam istilah lain "koordinasi" antar pelaksana yang terkait implementasi Program BKK agar ditingkatkan.
4. Program-program yang perlu diintensifkan adalah penyuluhan dan pembinaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan peningkatan produksi peternakan untuk menunjang keberlanjutan Program BKK.
5. Untuk menjamin keberlanjutan Program BKK, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar menyediakan anggaran (semacam biaya operasional untuk pemantauan dan pelaksanaan), sehingga keterpaduan masing-masing SKPD yang terlibat dalam implementasi program BKK terus berjalan. Disamping itu, untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan dari Program BKK maka pembangunan infrastruktur terutama jalan dan listrik, harus tetap menjadi prioritas yang utama. Dengan tersedianya jalan yang memadai dan listrik yang cukup, maka kegiatan usaha produktif dari anggota Pokmas akan menjadi lebih produktif.
6. Perlu dilakukan pelatihan untuk kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok yang bersangkutan.

Pelatihan yang dimaksud harus menitikberatkan praktek lapangan, disamping pelatihan di kelas, buku penunjang dan informasi lainnya. Pelatihan perlu melibatkan instansi/dinas atau pihak lainnya misalnya LSM dan Perguruan Tinggi.

7. PPL, Pengurus Pokmas, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat diharapkan lebih memberikan dukungan, bantuan, dan memotivasi agar anggota BKK tetap mempunyai semangat yang tinggi serta meningkatkan kebersamaan dan kegotongroyongan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin, (2015), *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*, Gava Media, Yogyakarta.
- Dunn, William N., (2000), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Herabudin, (2016), *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Keban, Yeremias T., (2014), *Enam Dimensi Strategis Ilmu Administrasi Negara : Konsep, Teori, dan Isu*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Konsultan Manajemen Wilayah Satuan Wilayah Kerja XIV Jawa Tengah, Modul *Coaching* Fasilitator Mengenai KSM, Semarang.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, (2008), *Analisis Kebijakan Publik Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*, Edisi Tahun 2008, LAN, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, (2014), *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014*.
- Purwanto, Erwan A., dan Dyah R.S., (2012), *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Syafie, Inu Kencana, (2010), *Ilmu Administrasi Publik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Wibawa, Samodra, (1992), *Beberapa Konsep Untuk Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, (1989), *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Malang.